MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 231/DJMT/KP7.1/VIII/2023

Menimbang : Dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) dan sebagai tindak lanjut surat bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 dan S-626/MK.02 /2023 dan tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024.

Dasar : Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Ri Nomor 230/BUA.1/UND.RA1.7/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H./ 196803181993031002, Pembina Utama Madya (IV/d), Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Ira Farella Anggraini, S.E., M.M./ 198705112009042003, Penata Tingkat I (III/d), Kasubbag Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Sekretariat;
3. Sofiyatul Mu`Minah, S.Kom./ 199204012019032016, Penata Muda (III/a), Analis Rencana Program dan Kegiatan.

Untuk : Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya TA. 2024, bertempat di Vasa Hotel Surabaya Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 31, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60189 pada tanggal 30 Agustus sd. 1 September 2023;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"